



Dana Desa Belum Bisa Dicairkan

MANGUPURA, NusaBali

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 46 desa di Kabupaten Badung terganggu. Walaupun sebenarnya dana desa yang digelontorkan dari APBN sudah ditetapkan 29 April 2015 lalu, tetapi karena harus menunggu peraturan bupati (Perbup), dana itu belum bisa dicairkan.

"Iya belum bisa dicairkan karena mesti menunggu Perbup," jelas Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa (BPMD-PD)

(dana desa), alokasi dana desa (ADD), penyesuaian PHR, pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten dan provinsi, serta bantuan tidak mengikat dari pihak tertentu. Untuk itu agar APBDes bisa ditetapkan maka sumber pendapatan ini harus betul-betul *clear*.

Kalau salah satu sumber pendapatan desa belum *clear*, berarti APBDes belum bisa ditetapkan? "Sekarang semuanya sudah hampir *clear*, tinggal proses beberapa hari lagi. Secara umum tidak ada masalah, karena sek-

juta sampai Rp 400 juta," imbuhnya.

Persoalan lainnya adalah nafkah untuk bendesa adat, kelian subak atau pekaseh, dan kelian banjar adat yang selama ini rutin diberikan masih menemukan batu sandungan, karena dalam regulasi yang baru belum diatur. Makanya, pemerintah kini sedang berupaya bagaimana mencari celah hukum dengan berkonsultasi ke Kemendagri dan BPKP, sehingga nafkah untuk aparat desa adat, serta pekaseh tersebut bisa tetap diberikan. **as**

Kabupaten Badung I Putu Gede Sridana, Minggu (31/5).

Karena pemerintah daerah harus mengeluarkan Perbup, Perbup itu kini sedang dirancang bahkan sudah dikirim ke pusat. Meski demikian untuk kegiatan rutin masih bisa dilakukan. Tetapi untuk kegiatan fisik memang belum. "Mudah-mudahan secepatnya sudah bisa ditetapkan," harapnya.

Menurut Sridana anggaran desa (APBDes) sebetulnya berasal dari banyak sektor, misalnya sumber pendanaan dari APBN

arang sudah ada PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa," jelasnya.

Sridana menjelaskan antara satu desa dengan desa lainnya itu APBDes-nya berbeda-beda. Rata-rata Rp 4,5 miliar sampai Rp 9 miliar. Tergantung jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah masyarakat miskin. Termasuk dengan dana desa yang dikurangkan dari APBN juga mengacu pada PP Nomor 22 Tahun 2015, sehingga besarnya pun berbeda. "Kalau tidak salah, masing-masing desa itu kisaran Rp 300



Enam Bulan Pengelola Pasar Kidul Tak Digaji ✓

BANGLI, NusaBali

Pengelola Pasar Kidul Bangli, keluhkan ngadatnya pencairan gaji mereka yang sudah hampir enam bulan tak kunjung dicairkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli. Meskipun besaran nafkah tergantung dari upah pungut yang didapatkan, namun bagi mereka hal itu sangat berarti. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak sedikit dari mereka harus minjam atau ngutang.

Kepala Pasar Kidul Bangli, Jro Sabda Negara, saat dikonfirmasi mengenai ngadatnya nafkah yang diterima dari hasil upah pungut, membenarkan realita itu. Bahkan kata pria asal Banjar Kawan, Bangli ini sejak Desember 2014 hingga memasuki bulan Juni 2015, belum menerima upah pungut (UP). "Padahal kita sudah melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, dengan ngadatnya pencairan UP, bahkan kami sampai meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari," ujarnya.

Dia menambahkan, besar upah yang didapatkan adalah 20 persen dari jumlah pungutan yang dihimpun. Untuk bulan Desember 2014 pihaknya berhasil memungut retribusi sebesar Rp 6.616.000 juta,

untuk Januari 2015 sebesar Rp 13.079.000 juta, Februari sebesar Rp 11.991.000 juta, Maret sebesar Rp 14.716.000 dan April, Rp 5.513.000. "Tutup bukunya tidak menentu, ada yang baru setengah bulan ada yang sampai satu bulan. Itu tergantung kebijakan di atas," ujarnya.

Tambahnya, alasan pihak Disperindag belum mengeluarkan gaji yang merupakan hak karyawan, karena terbentur SK. Bahkan ada selentingan ngadatnya pengurusan SK disebabkan karena pihaknya selaku pengelola tidak mengindahkan kebersihan pasar di sebelah timur. Namun nyatanya, Sabda Negara mengaku, selama ini pihaknya juga sudah beberapa kali melakukan pembersihan walaupun tanpa di dukung alat kebersihan yang memadai. "Kalau berlarut-larut UP kami tidak diturunkan, maka kami akan menyampaikan masalah ini ke pihak DPRD Bangli," ancamnya.

Sementara, Kadis Perindag Bangli, I Nengah Sudibia, saat dikonfirmasi, menampik hal itu. Dia mengatakan memang sebelumnya ngadatnya pencarian karena SK, namun sejatinya kini SK itu telah turun. "Gaji sudah bisa dicairkan tinggal petugas pasar mengamprah dana itu," ujarnya. **cr53**

Edisi : Senin, 1 Juni 2015

Hal : 8



Hotmix Tak Terealisasi

Warga Gadungan Blokir Jalan



CAMAT Selemadeg Timur, Gusti Putu Ngurah Dharma Utama, coba tenangkan massa yang blokir jalan di Banjar Teguh, Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan (kiri). Anggota DPRD Tabanan asal Desa Gadungan, Wayan Eddy Nugraha Giri, datang ke kerumunan massa dan meminta buka blokir jalan. Aksi Eddy Nugraha Giri memantik emosi massa, Minggu (31/5).

Suhu yang semula sejuk dengan dialog antara camat dan warga mendadak mendidih setelah kedatangan anggota DPRD Tabanan, Wayan Eddy Nugraha Giri.

TABANAN, NusaBali

Puluhan warga Desa Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, memblokir jalan jurusan Banjar Pucuk - Gadungan, tepatnya di wilayah Banjar Teguh, Desa Gadungan, Minggu (31/5). Warga memblokir jalan dengan menanam dua pohon pisang, penjor, dan menempatkan kayu bekas meja. Tak hanya itu, jalan juga ditu-

tup dengan membentangkan terpal dan spanduk bertuliskan 'Janji Palsu'.

Sebelum beraksi, puluhan warga berkumpul di patung Petani, sekitar pukul 08.00 Wita. Aksi pemblokiran jalan baru dimulai pukul 09.00 Wita dengan menanam dua pohon pisang. Selanjutnya warga mengambil terpal dan kayu bekas meja yang ada di salah satu kebun warga. Selanjutnya kayu dan bekas meja itu ditaruh melintang di tengah jalan. Secara mendadak, warga mencari kain kafan ke salah satu rumah warga lalu menuliskan kata 'Janji Palsu' dengan cat phylok.

Menurut rencana, aksi ini berlangsung selama satu jam. Namun semuanya berantakan setelah Camat Selemadeg Timur I Gusti Putu Ngurah Dharma Utama mendatangi warga. Dengan santun, Camat Dharma Utama meminta warga untuk membuka jalan sebab mengganggu arus lalu lintas. Namun

warga tak mau memenuhi permintaan tersebut sehingga terjadi dialog cukup panjang. Suhu yang semula sejuk dengan dialog dialogis antara Camat dengan warga mendadak mendidih setelah kedatangan anggota DPRD Tabanan dari Fraksi PDIP yang notabene warga Desa Gadungan, Wayan Eddy Nugraha Giri.

Politikus PDIP tersebut meminta warganya untuk membuka jalan, namun sarannya tak diindahkan. Ketegangan muncul saat Eddy Nugraha Giri mengatakan aksi blokir jalan bertentangan dengan hukum dan akan melaporkan aktor intelektual dari aksi pemblokiran jalan itu ke polisi. Mendengar akan dilaporkan ke polisi, salah seorang warga lantas pergi dan mengatakan akan menemui Ketua DPRD Tabanan, Ketut 'Boping' Suryadi.

Selisih faham antara rakyat dan wakil rakyat ini tak berlanjut sebab warga yang

Edisi : Senin, 1 Juni 2015

Hal : 7



Sambungan - - -

semula berniat gotong royong menguruk jalan pilih duduk, sembari menunggu koral dan *limestone* datang. "Tak ada gunanya debat di sini, suruh bupati atau Dinas PU turun agar nyambung," teriak warga. Salah seorang warga menuturkan, aksi blokir jalan ini bermula dari rasa kecewa, sebab Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti sempat janjikan perbaikan jalan dengan hotmix sepanjang 2 kilometer. Selain itu, warga juga kecewa, sebab dapat informasi urung dapat bantuan hotmix, tetapi akan mendapatkan lapen pada APBD Perubahan yang akan datang.

"Kami sebelumnya sempat menghadap ke Tegeh (tempat kediaman keluarga Bupati Tabanan di Desa Angseri, Kecamatan Baturiti). Saat itu, Dinas PU janjikan perbaikan 1 kilometer dengan hotmix, lalu Ibu Bupati nambahkan lagi 1 kilometer. Tetapi mana realisasinya?" tanya warga kepada Camat

Dharma Utama yang meminta buka blokir jalan. Warga juga menjelaskan, aksi blokir jalan dengan menanam pohon pisang merupakan aksi spontanitas tanpa ada komando. Semula warga hendak menutup lubang-lubang di jalan tersebut dengan *limestone*. Sembari menunggu *limestone*, aksi spontanitas tanam pohon pisang dan buat spanduk pun terjadi.

Tak berselang berapa lama, Ketua DPRD Tabanan Ketut 'Boping' Suryadi tiba di lokasi. Boping juga menerangkan apa yang sebelumnya diterangkan Camat Selemadeg Timur Dharma Utama mengenai kondisi keuangan daerah. Saat ini hotmix tak memungkinkan untuk direalisasikan. Boping mengatakan, saat ini pengaspalan jalan untuk Desa Gadungan masih dalam tahap tender, dan kemungkinan di bulan Juli sudah dieksekusi. "Tentang janji-janji untuk hotmix jalan, ayo kita kawal terus agar terealisasi," ajak Boping. Ajakan dan penjelasan Boping mampu

meredam emosi warga, sehingga warga kemudian membuka jalan yang telah diblokir, sekitar pukul 12.00 Wita.

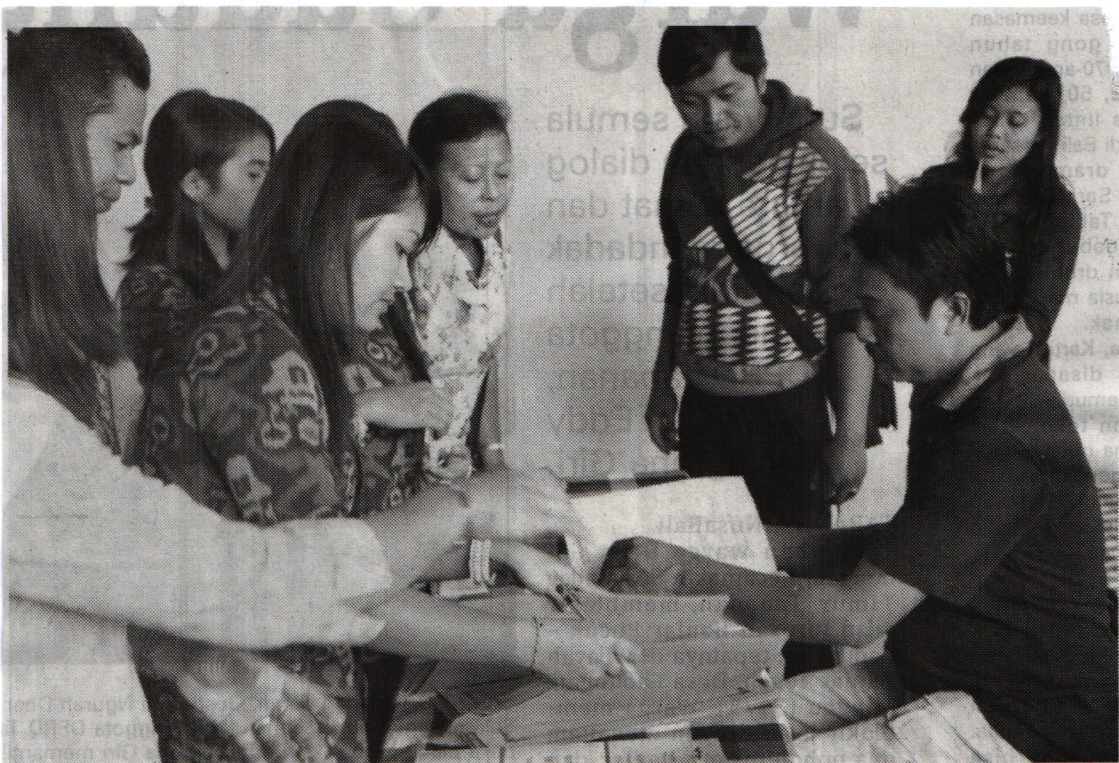
Usai membuka jalan, warga lanjut bergotong royong mengurug lubang jalan dengan *limestone* secara swadaya. Boping bersama anggota DPRD Tabanan, Wayan Eddy Nugraha Giri memantau aksi itu. Penjabat Perbekel Desa Gadungan, Wayan Sudika Pariguna menjelaskan, warga yang tak sabar menunggu jalan diaspal juga nyaris menggelar demo pada bulan Oktober 2014 lalu. Namun pihaknya berhasil mencegah aksi tersebut. Lanjut bersama Camat Selemadeg Timur, Dharma Utama menyampaikan kondisi itu ke Bupati Tabanan dan dijanjikan pengaspalan.

Selama jalan diblokir sekitar 3 jam lebih, tak begitu melumpuhkan arus lalu lintas. Banyak yang memutar arah, sebab masih ada jalan alternatif menuju dan keluar desa Gadungan. **k21**



Karangasem Krisis Blangko e-KTP

★ Cari Pinjaman 3 Ribu Blangko
ke Buleleng



● NUSABALI/NANTRA

Petugas memberikan pelayanan e-KTP di Karangasem, blangko sempat habis, hingga pinjam 3.000 blangko ke Buleleng.

Permohonan pelayanan e-KTP di Karangasem meningkat drastis, rata-rata per hari masuk 200 pemohon e-KTP.

AMLAPURA, NusaBali

Kabupaten Karangasem mengalami krisis blangko kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP, di tengah semakin tingginya permintaan pelayanan dari warga masyarakat. Sebab, suplai dari pusat macet sejak awal Mei 2015 lalu dan sebelumnya 5.000 blangko habis, digunakan selama Januari-April 2015.

Upaya penanganan pun dilakukan dengan melakukan pinjaman ke Buleleng sebanyak 3.000 blangko per 1 Mei 2015.

Apalagi belakangan pelayanan meningkat, rata-rata per hari melayani 200 pemohon e-KTP.

Atas rekomendasi dari pusat maka Dinas Kependudukan Catatan Sipil Karangasem pinjam ke Buleleng 3.000 blangko. Pusat menjanjikan suplai untuk enam bulan ke depan, 33.000 blangko, ditambah dua mesin cetak e-KTP. Kadisdukcapil I Wayan Sumidia menjelaskan hal itu di Amlapura, Minggu (31/5).

Pusat kata Sumidia, tidak mendrop blangko sekaligus un-

Edisi : Senin, 1 Juni 2015

Hal : 8



Sambungan . . .

tuk kebutuhan setahun. "Kiriman dari pusat sebelumnya sebanyak dua kali, masing-masing 2.500 blangko, total 5.000 blangko, masih jauh dari kebutuhan. "Hitung sendiri jika setiap hari melayani 200 permohonan, berarti selama 25 hari saja membutuhkan 5.000 blangko," kata Sumidia.
Dari 3.000 blangko pinjam di

Buleleng kata Sumidia, tinggal tersisa 700 blangko. "Makanya kami berharap agar pusat secepatnya menyuplai blangko, agar tidak terjadi kekosongan di daerah," harapnya.

Sedangkan, lanjut Sumidia, untuk cetak e-KTP, yang selama ini memanfaatkan dua mesin, tidak ada kendala. Apalagi nantinya ada

tambahan dua mesin dari pusat. "Terpenting blangko lancar, pelayanan lancar," tambahnya.

Selain kekurangan blangko, ternyata di Karangasem sejak empat tahun berjalan perekaman e-KTP, sejak tahun 2012, tercecer sebanyak 115.941 wajib KTP. Wajib KTP tercatat 427.014 wajib KTP dan yang terekam

311.073 wajib KTP.

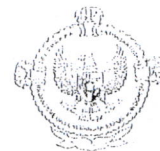
Di delapan kecamatan masih banyak warga wajib KTP, belum terekam, yakni di Kecamatan Abang 18.862 wajib KTP, Kecamatan Selat 9.041 wajib KTP, Kecamatan Bebandem 12.489 wajib KTP.

Sementara di Kecamatan Abang 18.862 wajib KTP, Kecamatan Karangasem 20.266 wajib KTP, Kecamatan Kubu 25.134 wajib KTP, Kecamatan manggis 15.227 wajib KTP, Kecamatan Sidemen 8.702 wajib KTP dan Kecamatan Rendang 6.220 wajib KTP.

Banyak faktor penyebab membludaknya warga mengurus e-KTP belakangan ini. Selain untuk kepentingan sekolah, melamar pekerjaan, dan yang paling banyak untuk melengkapi syarat administrasi yang tengah menjalani perawatan di rumah sakit, terutama yang masuk program JKBM atau BPJS.

"Maklum juga masyarakat berbondong-bondong mengurus e-KTP, karena baru merasa perlu punya e-KTP, untuk kepentingan, mendesak," lanjutnya.

Mulanya dinas mengeluarkan kebijakan memberikan pelayanan hingga Sabtu, dipermasalahkan Bagian Hukum Setdakab Karangasem, karena bertentangan dengan Peraturan Bupati Karangasem No 59 tahun 2012 tentang ketentuan hari kerja. Padahal pelayanan selama Januari-Maret 2015, mencapai 477 wajib KTP. k16



Soal Vila Tanpa IMB di TNBB

SE Menhut Mesti Ditinjau Ulang

MESKIPUN pemerintah pusat memiliki hak sepenuhnya mengelola Taman Nasional Bali Barat (TNBB), pemerintah daerah mestinya diberikan kewenangan mengatur investasi di kawasan tersebut. Pembagian kewenangan itu bisa dilakukan dengan meninjau ulang Surat Edaran (SE) No.2/Menhut-IV/2007 tanggal 6 Juli 2007 tentang perizinan dan pungutan pajak/retri-

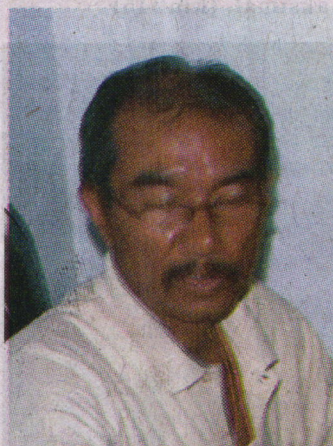
busi dalam pengusahaan pariwisata alam di kawasan konservasi.

Demikian diungkapkan pengamat hukum yang juga Dekan Fakultas Hukum (FH) Universitas Panji Sakti (Unipas) Singaraja, I Putu Sugiardana, Minggu (31/5) kemarin.

Kata Sugiardana, investor yang sekarang tengah mengembangkan investasi wisata di TNBB tersebut

mestinya tidak menjadikan SE tersebut untuk bebas berinvestasi tanpa mengikuti aturan yang ada di daerah yang mewajibkan mengurus IMB. Investor seharusnya menghormati kebijakan otonomi daerah yang telah memiliki kebijakan dalam mengatur setiap pembangunan di daerah ini. Apalagi, secara kewilayahan TNBB itu berada di Buleleng. "Saya kira sudah terjadi 'kontradiksi norma' di mana pemerintah pusat tidak memerhatikan kepentingan di daerah. Memang hak pengelolaan TNBB milik pusat, tapi kepentingan pemerintah dalam mengatur seharusnya dihormati dan dipatuhi pula," tegasnya.

Menurut Sugiardana, kebijakan pemerintah daerah menata investasi termasuk di kawasan yang kewenangan pengelolaannya ada pada tangan pemerintah pusat, sejalan dengan semangat otonomi daerah. Pengaturan dalam bentuk perizinan ini dilakukan untuk mencegah munculnya dampak kerusakan lingkungan oleh setiap aktivitas investasi, baik yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri maupun investor asing. Dia mencontohkan, pembangunan vila dengan kapasitas sepuluh kamar, restoran, dan kolam renang di TNBB. Investasi yang sudah dilakukan ini jelas sudah merugikan pemerintah daerah dalam hal retribusi IMB. Bahkan, investasi yang



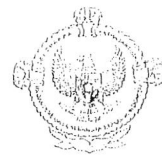
"Saya kira sudah terjadi 'kontradiksi norma' di mana pemerintah pusat tidak memerhatikan kepentingan di daerah. Memang hak pengelolaan TNBB milik pusat, tapi kepentingan pemerintah dalam mengatur harusnya dihormati dan dipatuhi pula."

Dekan Fakultas Hukum
Unipas Singaraja
I Putu Sugiardana



"Terhadap investasi di TNBB itu perizinannya bersifat sektoral dan belum mengacu pada RTRW di kabupaten. Kami akan coba melakukan kajian dan verifikasi lapangan bersama Tim Yustisi Pemkab."

Kepala BLH Buleleng
Drh. Nyoman Surya
Temaja



Sambungan - - -

dicurigai melanggar sempadan pantai, terkesan hanya memberikan keuntungan investor. Sementara ancaman kerusakan lingkungan itu justru diterima oleh pemerintah daerah. "Daerah bukan ingin menjadi 'raja kecil' yang sewenang-wenang mengatur. Tapi paling tidak kepentingan daerah dalam menata pembangunan melalui regulasi yang ada itu harus diperhatikan oleh pusat biar tidak terjadi egosektoral," tegasnya.

Sugiardana menambahkan, salah satu solusi dalam menyelesaikan kontradiksi norma dalam pengelolaan TNBB itu harus dilakukan dengan jalan koordinasi dan duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Upaya koordinasi ini akan memberikan ruang kepada para pihak dalam mengambil jalan tengah, sehingga persoalan yang terjadi bisa diatasi dan tidak menimbulkan polemik panjang. Bahkan, pihaknya menyarankan SE tersebut hendaknya dikaji ulang.

Sementara itu, Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Buleleng, Drh. I Nyoman Surya Temaja, mengatakan, sejauh ini pihaknya belum melakukan kajian lingkungan terhadap investasi di TNBB yang ditemukan lembaga dewan belum mengantongi IMB. Untuk itu, Temaja berjanji segera berkoordinasi dengan instansi terkait di Pemkab Buleleng dan mencoba melakukan

kajian dari segi lingkungan. "Terhadap investasi di TNBB itu perizinannya bersifat sektoral dan belum mengacu kepada RTRW di kabupaten. Kami akan coba melakukan kajian dan verifikasi lapangan bersama Tim Yustisi Pemkab," tegasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan vila, restoran, dan kolam renang kawasan TNBB oleh PT Trimbawan Swastama Sejati yang belum dilengkapi IMB disikapi Dirjen Penguasaan Hutan Konservasi Alam (PHKA) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Pembangunan sarana wisata yang merupakan pengembangan dari investasi yang sudah dilaku-

kan sebelumnya dinyatakan tidak harus dilengkapi dengan IMB yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Alasannya, karena adanya Surat Edaran (SE) No. 2/Menhut/

IV/2007 tanggal 6 Juli 2007. Lembaga dewan Buleleng akan meminta penjelasan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya. (kmb38)



Terkait Permohonan Tanah Negara

Adat Air Sanih Pertanyakan Pelimpahan Hak Kelola

SINGARAJA, NusaBali

Pihak Desa Pakraman Air Sanih, Desa Bukti, Kecamatan Kubutambahan pertanyakan pelimpahan hak pengelolaan atas tanah negara (TN) berstatus HGB yang ada di wewidangan-nya, bersebelahan dengan objek wisata kolam permandian Air Sanih. Masalahnya, pemerin-tah pusat telah mengizinkan pengelolaan TN yang diperkirakan seluas kurang lebih 65 are itu kepada pihak adat.

"Sekarang tinggal pelimpahan secara resmi dari Pemkab Buleleng saja, kita tinggal menunggu itu saja, karena Kementerian Agraria telah mengizinkan pengelolaan tanah itu ke-pada kami," ungkap anggota tim 11 Desa Pakra-man Air Sanih, I Gede Widiasta, Minggu (31/5).

TN tersebut semula dikelola oleh pihak investor dengan membangun Hotel Puri Sanih lengkap dengan Bar dan Restoran, dengan status HGB. Namun, sejak tahun 2005 silam, TN tersebut ditelantarkan lantaran Hotel Puri Sanih tidak terurus lagi. Warga pun kemudian memohon tanah tersebut sebagai pendukung sekaligus lokasi dari kegiatan keagamaan Melasti dan Penirtaan.

Masalahnya, selain ditelantarkan, HGB atas pengelolaan tanah itu juga telah berakhir. War-ga adat sudah mengajukan hak pengelolaan tanah sejak tahun 2012 silam, namun tidak pernah mendapat respons. Warga memohon sebagai lokasi Melasti karena lahan itu dulunya juga sebagai tempat Melasti.

Namun sejak tanah itu dikelola oleh pihak investor, lokasi Melasti berpindah ke sebelah

timur dari lokasi tersebut.

Menurut anggota tim 11, Gede Widiasta, permohonan pengelolaan atas tanah tersebut telah dikabulkan oleh Kementerian Agraria hampir sebulan lalu. Hal itu diketahui setelah perwakilan pihak adat dan tim dari Pemkab berkonsultasi ke Kementerian Agraria, terkait dengan status HGB sekaligus mengajukan permohonan pengelolaan.

"Dalam konsultasi itu pihak Kementerian Agraria telah memberikan persetujuan kepada kami di adat. Tapi penyerahan pengelolaan se-cara resminya diserahkan kepada pemerintah kabupaten, nah ini yang belum. Kami berharap ini bisa secepatnya, sehingga kami bisa menata



HOTEL Puri Sanih di kawasan objek wisata air Sanih yang berdiri di atas tanah negara, dan telantar sejak tahun 2005 silam.

lahan itu untuk tempat Melasti," kata Widiasta.

Sementara Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana yang dikonfirmasi terpisah belum bisa memberikan penjelasan secara rinci terkait proses pelimpahan tersebut. Bupati mengaku masih harus mempelajari dokumen dari hasil konsultasi ke Kementerian Agraria tersebut.

"Dalam masalah ini saya akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat banyak apalagi adat, tapi saya harus pelajari dulu. Maaf sekali, saya belum sempat pelajari berkas itu, kerena terus ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Dalam waktu segera pasti ada jawabannya," kata Bupati Putu Agus.

Sebelumnya, Prajuru Desa Pekraman Air Sanih dan para tokoh Desa Bukti sudah menda-tangi lembaga DPRD Buleleng agar memfasilitasi keinginan memohon HGB atas TN tersebut.

Bahkan Bupati Putu Agus kala itu juga mer-espon keinginan warga adat Air Sanih tersebut. Bupati Putu Agus menegaskan, sangat men-dukung pengembalian fungsi dari TN tersebut yang semula dimanfaatkan oleh warga sebagai kawasan suci untuk melaksanakan kegiatan keagamaan.

Bupati berjanji akan membantu memfasili-tasi warga Adat Air Sanih untuk memohon HGB atas tanah tersebut, sehingga bisa difungsikan kembali sebagai pendukung dari kegiatan keagamaan oleh Pakraman Air Sanih.

Untuk mendapat penjelasan resmi Bupati minta empat perwakilan dari Pakraman Air Sanih ikut mendampingi dalam konsultasi ke Kementerian Agraria. **k19**

Edisi : Sain, 1 Juni 2015

Hal : 4



Bulog Bali Minta Pemkab Segera Ajukan SPA ✓

DENPASAR, NusaBali

Perum Bulog Divisi Regional Bali meminta Pemkab/kota segera mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) untuk menyalurkan beras miskin mengantisipasi lonjakan harga menjelang hari raya keagamaan.

"Kami berharap pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengajukan SPA untuk memastikan ketersediaan beras kepada masyarakat menjelang hari raya keagamaan karena raskin membantu pengendalian harga," kata Kepala Perum Bulog Divisi Regional Bali, Wayan Budhita di Denpasar, Minggu (31/5).

Dia menjelaskan apabila masyarakat utamanya dengan ekonomi rendah telah mendapatkan pasokan beras, maka diharapkan kenaikan harga yang biasanya terjadi menjelang hari raya, salah satunya bisa dikendalikan. Hingga saat ini, kata dia, dari sembilan kabupaten/kota, baru Kabupaten Tabanan yang sudah 100 persen mendistribusikan beras miskin kepada warganya.

Sedangkan kabupaten/kota lainnya rata-rata masih sekitar 70 persen atau di bawah 100 persen yang menyalurkan raskin kepada masyarakat.

Bulog Bali menargetkan selama tahun 2015, sebanyak 27.346

ton beras untuk masyarakat miskin bisa tersalurkan. Pada Juli 2015, tiga hari raya besar keagamaan jatuh berdekatan yakni Hari Raya Galungan, Lebaran dan Kuningan sehingga dipastikan kebutuhan akan beras akan meningkat.

Untuk itu, pihaknya berencana akan mempercepat waktu distribusi beras miskin sebanyak dua kali pada Juni dan Juli 2015 yang disesuaikan dengan instruksi Pemerintah Pusat.

Selain optimalisasi penyaluran raskin oleh Bulog, pihaknya juga akan intensif menggelar pasar murah dan operasi pasar bekerja sama dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagai salah satu antisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga saat hari raya tersebut.

Bulog Bali, lanjut dia, juga secara berkala akan disuplai beras dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 1.000 ton sehingga menambah jumlah beras di Pulau Dewata yang mencapai sekitar 10.800 ton yang diprediksi mampu memenuhi kebutuhan hingga lima bulan mendatang.

Sementara itu total rata-rata konsumsi beras di Pulau Dewata per bulan mencapai sekitar 2.600 ton. **ant**

Edisi : Senin, 1 Juni 2015

Hal : 6